

## ANALISIS DETERMINAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI *E-GOVERNMENT* (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI SULAWESI SELATAN)

Rasyidah Nadir<sup>1)</sup>, Muhammad Arsyad<sup>1)</sup>, Tawakkal<sup>2</sup>

<sup>1)2)3)</sup> *Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar*

### ABSTRACT

This study aims to analyze several determinant variables or determinants that influence the level of disclosure of Local Government Financial Statements (LKPD) after the enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness which is an effort to realize Good Government, and focus on the application of LKPD through e-government official website is content from the Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR). The factors (independent variables) chosen are the size of the regional government, the debt financing ratio (leverage), the level of regional independence, the level of Gross Regional Domestic Revenue (GRDP), and the opinion of the Supreme Audit Agency (BPK). The analytical tool used is multiple linear regression. The population in this study is the financial statements of district / city local governments in South Sulawesi for the 2018 fiscal year. The sample is determined based on certain criteria or purposive sampling methods, namely local governments that have e-government and can be accessed properly and are not in a condition of improvement. The results showed the size of the local government, leverage, level of independence, the level of GDP had a positive effect on the transparency of local government financial reports through e-government, but the BPK audit opinion did not have a positive effect on the transparency of local government financial reports through e-government. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa variabel determinan atau faktor-faktor penentu yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan upaya perwujudan *Good Government*, dan berfokus pada penerapan LKPD melalui website resmi pemerintah daerah (*e-government*) merupakan konten dari *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR). Faktor-faktor (variabel independen) yang dipilih adalah ukuran pemerintah daerah, rasio pembiayaan utang (*leverage*), tingkat kemandirian daerah, tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan opini Badan Pemeriksa keuangan (BPK). Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2018. Sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau *purposive sampling method* yaitu pemerintah daerah yang memiliki *e-government* dan dapat diakses dengan baik serta tidak dalam kondisi perbaikan. Hasil penelitian menunjukkan ukuran pemerintah daerah, leverage, tingkat kemandirian, tingkat PDRB berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah melalui e-government, namun opini audit BPK tidak berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah melalui e-government.

**Kata Kunci:** *Determinan, Transparansi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Internet Financial Local Government Reporting, E-Government*

### 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel merupakan tuntutan para *stakeholders* baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Kepala Daerah maupun Kepala Negara sebagai pengelola keuangan Negara/Daerah telah meminta amanah untuk mengelola keuangan Negara/Daerah kepada masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, transparansi pengelolaan keuangan menjadi tuntutan mutlak bagi para pengelola keuangan Negara/Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Manfaat penting transparansi pengelolaan keuangan daerah menurut Djalil, Rizal (2014) diantaranya adalah dapat mendeteksi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang berupa kecurangan (*fraud*), ketidakpatuhan pengelolaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatutan sehingga dapat

<sup>1</sup> Korespondensi penulis: Rasyidah Nadir, Telp. 081355152504, rasyidah\_nadir@yahoo.co.id

meminimalisir terjadinya kerugian daerah; Kelemahan dan kekuatan kebijakan dapat diidentifikasi lebih awal untuk dapat segera dilakukan perbaikan sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai; Meningkatkan kepercayaan para stakeholders khususnya masyarakat sehingga ketaatannya kepada peraturan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan; dan Menciptakan iklim investasi yang kondusif supaya para investor tertarik menanamkan modal di daerah sehingga dapat menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.

Salah satu media yang paling mudah untuk merealisasikan transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah *website* yang dapat diakses melalui jaringan internet. Sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) telah memiliki *website* namun Pemda belum melakukan *update* data yang dipublikasikan pada *site* tersebut. Selain itu, alamat *website* masing-masing pemda dalam *site* belum di-*link*-kan dengan *website* sumbernya pada masing-masing Pemda. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa pemda selaku lembaga eksekutif telah mencoba menerapkan transparansi dalam menginformasikan pengelolaan keuangan daerah melalui *website*. Akan tetapi informasi yang ditampilkan bersifat umum dan normatif sedangkan informasi yang bersifat rinci seperti anggaran dan realisasi belanja per kegiatan maupun per proyek yang sedang dilakukan cenderung belum ditampilkan dengan komprehensif.

Selain itu, *website* pemerintah daerah, secara umum, tidak menampilkan informasi mengenai seluruh Laporan Hasil Reviu maupun Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) seperti Inspektorat dan BPKP maupun BPK selaku aparat pengawasan eksternal. Untuk lebih mendorong dan memudahkan para pemda mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah maka diperlukan suatu kebijakan yang mengatur tentang informasi-informasi yang wajib ditampilkan dalam *website* masing-masing Pemda. *website* resmi Kemendagri memiliki daftar tautan/*link* ke *website* masing-masing Pemda sehingga memudahkan para stakeholders dalam memperoleh informasi pengelolaan keuangan suatu Pemda maupun membandingkan pengelolaan keuangan antar Pemda. Peningkatan transparansi dapat dilihat dari ketersediaan suatu informasi dan aksesibilitasnya dalam memperoleh informasi tersebut untuk publik, maka salah satu cara yang paling efektif dalam melaksanakan keterbukaan informasi keuangan publik adalah menggunakan media elektronik yaitu situs resmi yang dalam istilah sistem informasi untuk pemerintahan disebut *e-government*.

Penyusunan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang menjadi syarat agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan akuntabel. Bentuknya berupa keterbukaan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Transparansi informasi pemerintah terdapat dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini, menjadi dasar bagi entitas pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk mulai memerhatikan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan Negara atau Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, contohnya dengan memanfaatkan media internet. Berdasarkan pernyataan undang-undang tersebut, setiap data yang menunjang penelitian mengenai pelaporan informasi keuangan sektor publik seharusnya dapat diakses oleh setiap pemohon informasi publik dengan kejelasan atas penggunaan informasi tersebut Sutaryo dkk (2013) dalam Verawaty (2017). Kravchuk dan Voorhees (1999), Mead (2002), Styles dan Tennyson (2007) dalam Verawaty (2017) menyatakan bahwa penyebaran laporan ini merupakan tanggung jawab dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Tentunya salah satu cara yang paling efektif dari segi cara, efisien dari segi waktu, dan ekonomis dari segi biaya untuk agen pemerintah yang diotorisasi untuk tanggung jawab tersebut dalam menyebarkan informasi, internet dengan aplikasi IFR (*Internet Financial Reporting*) melalui *e-government* merupakan alternatif yang tepat.

Hasil penelitian Setyowati (2016) menemukan bahwa kekayaan pemerintah daerah dan pembangunan manusia memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan aset pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif. Diferensiasi fungsional, debt, dan intergovernmental revenue pemerintah daerah terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. sementara hasil penelitian Prabowo (2016)

menunjukkan bahwa tingkat kemandirian berpengaruh dalam penerapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) melalui website (internet) resmi pemerintah daerah (IFLGR), sedangkan yang lain tidak berpengaruh.

Hasil penelitian Verawaty (2015) menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *size*, *income per capita*, dan *debt level* dengan aksesibilitas laporan keuangan. Penelitian Laswad *et.al* (2005) dalam Verawaty (2017) menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet dapat diprediksi berdasarkan tingkat *financial leverage*, *municipal wealth*, *press visibility* dan *council type*. Sedangkan *local authority size* dan *level of political competition* tidak dapat digunakan untuk memprediksi ada atau tidaknya *Internet Financial Reporting (IFR)* oleh pemerintah daerah di Selandia Baru.” Hal yang sama diperoleh dari penelitian Garcia (2010) menunjukkan bahwa *size*, *leverage*, *capital*, *investment*, *political competition* berpengaruh positif, sedangkan *press visibility* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah melalui internet.

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada sektor publik sudah banyak diteliti. Namun, untuk penelitian pada praktek pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang mengungkapkan informasi keuangan pada media internet masih sangat minim, khususnya di lingkungan pemerintahan. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prabowo (2016), Setyowati, Lilis (2016) dan Verawaty (2017). Penelitian ini akan menguji dan mencari pembuktian secara empiris pengaruh kompetisi politik (*political competition*), kekayaan pemerintah daerah (*assets*), *leverage*, tingkat kemandirian daerah, tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan opini BPK atas LKPD suatu daerah terhadap penerapan *Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR)* melalui *e-government*. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul “Determinan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui *E-Government* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan)”.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji pengaruh Kekayaan pemerintah daerah terhadap penerapan *e-government*, 2) menguji pengaruh Rasio pembiayaan utang (*leverage*) terhadap penerapan *e-government*, 3) menguji pengaruh tingkat kemandirian daerah terhadap penerapan *e-government*, 4) menguji pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerapan *e-government*, dan 5) menguji pengaruh opini BPK terhadap penerapan *e-government*.

Penelitian ini menjadi isu yang penting untuk diuji karena konsep transparansi laporan keuangan sangat penting. Publik berhak mengetahui alokasi dana publik, bahkan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan hasil pemeriksaan oleh BPK. Media *e-government* dapat menjadi sarana publikasi kinerja keuangan yang merefleksikan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan sumber dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota.

Target temuan dalam penelitian ini adalah mendapatkan bukti empiris mengenai analisis determinan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. target temuan didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu antara lain Laswad dkk (2005); Styles dan Tennyson (2007); Hilmi (2010); Lesmana (2010); Rora (2010); Syafitri (2012); Medina (2012); Jeckly dan Eka (2014); Trisnawati dan Achmad (2014); Junaedi (2015); Istikomah dan Mutmainah (2015); Nainggolan dan Purwanti (2016); Setyowati (2016); Hasanah (2016); Verawaty (2014), (2017); Pitri dan Merina (2017). Penelitian-penelitian terdahulu memberikan hasil yang berbeda-beda mengenai determinan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah kota/kabupaten di Sulawesi Selatan dalam upaya meningkatkan penerapan *e-government* dalam bidang akuntansi, yaitu *Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR)* melalui media *e-government* sehingga akan tercapai transparansi publik yang diharapkan.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran website resmi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memiliki *website* yang dikelola secara aktif dan tidak dalam kondisi perbaikan. Responden dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018. Serta data sekunder lainnya dari *website* Badan Pusat Statistik, *Website* Kementerian Keuangan dan *Website* Badan Pemeriksa Keuangan. Metode wawancara pada beberapa Pemerintah daerah digunakan untuk memperoleh tambahan argumentasi dari variabel yang diuji.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif menggunakan regresi logistik meliputi Uji Statistik Deskriptif, *Goodness of Fit Test*, *Chi Square* ( $X^2$ ), Koefisien Determinasi, Uji klasifikasi dan Uji Hipotesis Regresi Logistik. Persamaan yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{UPD} + \beta_2 \text{KPD} + \beta_3 \text{Lev} + \beta_4 \text{TK} + \beta_5 \text{PDRB} + \beta_6 \text{OAB} + e$$

**Tabel 1. Deskripsi Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur
Variabel Dependen: e-government	<i>e-government</i> merupakan bagian dari <i>Internet Financial Reporting</i> yang merupakan seperangkat pengumuman mengenai informasi finansial tahunan secara elektronik dari pemerintah daerah (Laswad et al, 2005).	Beberapa langkah yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan dalam <i>e-government</i> .	Skala ordinal dengan angka dummy bernilai 1 (satu) jika laporan keuangan lengkap; bernilai 0 (nol) jika ada salah satu komponen laporan yang tidak lengkap.
Variabel independen: 1. Ukuran Pemerintah Daerah (UPD)	Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar kecilnya pemerintah daerah (Sinaga dan Prabowo, 2011)	Total Aset	Skala nominal diukur dengan Logaritma natural total aset
2. Leverage (Lev)	Kemampuan pemda dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki (Trisnawati dan Achmad, 2014)	Total kewajiban dengan total aset yang dimiliki pemda.	Skala rasio diukur dengan logaritma natural total kewajiban dengan total aset yang dimiliki pemda.
3. Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (KPD)	Tingkat kemandirian Pemda ditunjukkan dengan kemampuan membiayai pengeluaran operasional dengan menggunakan PAD (Puspita dan Martini, 2012)	Besarnya pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total. Realisasi Anggaran Pendapatan yang diterima	Skala rasio total PAD terhadap Total Pendapatan.
4. Tingkat PDRB	PDRB perkapita merupakan proksi untuk menentukan pendapatan perkapita penduduk. Penelitian Styles dan Tennyson (2007) dalam Verawaty (2014)	PDRB perkapita atas dasar harga berlaku	Skala nominal diukur dengan log PDRB perkapita pemerintah daerah; pada tahun <sub>t</sub>
5. Opini Audit BPK (OAB)	Pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, diacuh pada penelitian Trisnawati dan Achmad (2014)	Opini audit terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Skala ordinal dengan angka dummy bernilai 1 (satu) jika opini audit WTP; bernilai 0 (nol) jika opini audit non WTP.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dikumpulkan melalui observasi langsung dengan media internet terhadap ketersediaan e-government pada 25 pemerintah daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan ketersediaan website di setiap pemerintah daerah. Seluruh populasi digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 21 pemerintah daerah kabupaten, 3 (tiga) pemerintah kota, dan 1 (satu) pemerintah provinsi. Hasil survey (observasi) terhadap e-government pemerintah provinsi, kabupaten dan kota ditemukan 5 (lima) pemerintah kabupaten yang tidak dapat diakses dan website dalam keadaan perbaikan yaitu pemerintah kabupaten Bantaeng, kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sinjai. Observasi dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 karena informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru dapat diinformasikan, hal ini terkait data variabel Opini Audit BPK yang menjadi salah satu

variabel dalam penelitian ini. Observasi kedua dilakukan pada tanggal 10 Juli 2019, ditemukan 3 (tiga) pemerintah kabupaten yang masih belum bisa diakses dan masih dalam perbaikan yaitu pemerintah kabupaten Bantaeng, kabupaten Pinrang, dan Pemerintah kabupaten Sinjai.

Secara umum website yang disajikan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota berisi profil, visi misi, profil gubernur/bupati/walikota, profil wakil gubernur/bupati/walikota, profil provinsi/kabupaten/kota dan data kepegawaian, ragam informasi dengan konten informasi pengumuman, artikel dan dokumen keuangan, produk hukum dengan konten kumpulan keputusan dan peraturan, potensi daerah dari berbagai sektor, aksi PPK dan layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat. Data tingkat PDRB perkapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari website Badan Pusat Statistik (BPS) (<http://bps.go.id>). Ketika data tidak ditemukan dan belum terpublikasi maka data diperoleh secara langsung melalui instansi atau badan yang berwenang terhadap informasi tersebut. Konten yang ada pada pemerintah daerah belum cukup memadai terkait informasi keuangan yang disajikan, meskipun dalam website pemerintah daerah kabupaten dan kota telah menyajikan informasi keuangan.

Berdasarkan pengujian model regresi logistic menunjukkan nilai *statistics Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit* lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya. Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa besarnya nilai *statistics Hosmer and Lemeshow Goodness-of-fit* sebesar 6,902 dengan probabilitas signifikansi 0,547 yang nilainya jauh di atas 0.05. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dapat diterima. Hasil tabel klasifikasi 2 X 2 menghitung nilai estimasi yang benar dan salah, pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini e-government pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dapat diakses (1) dan tidak dapat diakses (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen e-government yang dapat diakses (1) dan tidak dapat diakses (0), hasil menunjukkan bahwa pada kolom, e-government yang dapat diakses ada 24 pemerintah daerah. Sedangkan pada baris, hasil observasi sesungguhnya yang dapat diakses e-government hanya 21 pemerintah daerah. Jadi ketepatan model ini adalah 21/24 atau 87,5%.

Variabel independen Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) signifikan pada prob 0.613, variabel Leverage (Lev) signifikan pada prob 0.856, variabel Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (KPD) signifikan pada prob 0.636, variabel Tingkat PDRB signifikan pada prob 0.797, dan variabel Opini Audit BPK (OAB) signifikan pada prob 0.999. Dari persamaan regresi logistic menunjukkan bahwa *log of odds* e-government yang dapat diakses secara positif berhubungan dengan variabel independen ukuran pemerintah daerah, leverage, tingkat kemandirian pemerintah daerah, tingkat PDRB, dan opini audit BPK. Dalam hal ini transparansi laporan keuangan pemerintah daerah melalui e-government yang dapat diakses atau tidak, setiap unit kenaikan ukuran pemerintah daerah dan kenaikan PDRB masing-masing dengan angka sebesar 0.000, kenaikan leverage dengan angka sebesar 5.047, kenaikan kemandirian pemerintah daerah dengan angka sebesar 5.670, dan penurunan opini audit BPK dengan angka -19.712. masing-masing variabel independen akan menunjukkan kenaikan atau penurunan jika variabel independen yang lain dianggap konstan.

Ukuran pemerintah daerah dan leverage menunjukkan pengaruh positif terhadap penerapan e-government, hal ini mengindikasikan bahwa pada umumnya pemerintah daerah dengan kekayaan relatif besar memiliki jumlah dan dana transfer besar tentunya digunakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dengan bentuk transparansi laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban. Pengungkapan informasi leverage melalui e-government dapat memfasilitasi kreditur untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan Laswad et.al (2005) menghubungkan kinerja terhadap *Internet Financial Local Government Reporting* (IFLGR) dengan kekayaan pemerintah daerah yang digambarkan dengan seberapa besar aset pemerintah daerah dengan IFLGR, dan memperbandingkan leverage antar pemerintah daerah dengan IFLGR. Hasil penelitian ini berbeda dengan Verawaty (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara ukuran pemerintah daerah melalui aksesibilitas laporan keuangan di internet atau melalui penerapan e-government.

Tingkat kemandirian daerah dan tingkat pendapatan per kapita daerah dalam penelitian ini menunjukkan hubungan positif terhadap transparansi laporan keuangan melalui e-government. Tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat ditunjukkan dengan penggunaan pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran operasional dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Jika Pemda mampu membiayai kegiatan daerah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah baik. Pemda yang menunjukkan kinerja yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela dan akan memilih untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat (Craven & Marston, 1999) dalam Hasanah (2016). Hasil

Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama oleh Medina (2012) menemukan hasil bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap ketersediaan informasi pada situs resmi Pemda. Tingginya tingkat kemandirian akan mendorong pemda untuk melakukan transparansi informasi keuangan Pemda, temuan yang sama juga pada penelitian Hasanah (2016). *Styles and Tennyson* (2007) menyatakan semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin tinggi pula *political monitoring* oleh masyarakat dan semakin tinggi permintaan informasi yang disediakan pada situs resmi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah.

Opini audit tidak berpengaruh secara positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah melalui e-government. Hasil penelitian ini berbeda dengan Junaedi (2015) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Internet-Based Financial Reporting*, pengaruh positif menunjukkan semakin baik hasil audit dari BPK akan semakin mendorong pemerintah daerah dalam mengungkapkan laporan keuangan melalui internet. Pengaruh negative menunjukkan pernyataan audit yang berikan BPK belum sepenuhnya memberikan kesadaran bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan transparansi laporan keuangan yang ada. Hal ini dapat terlihat dari ketidaklengkapan informasi keuangan yang tersaji dalam *website* pemerintah daerah dan kota di Sulawesi Selatan, meskipun sebagian besar *e-government* pemerintah sudah dapat diakses.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah, leverage, tingkat kemandirian pemerintah daerah, tingkat PDRB berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah melalui e-government pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, namun pernyataan opini audit BPK berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah melalui e-government.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Kravchuk, R.S., & Voorhees, W.R., "The New Governmental Financial Reporting Model under GASB No. 34: An Emphasis on Accountability," *Public Budgeting and Finance*, 21 (3): 1-30, 1999.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P., "Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities," *Journal of Accounting and Public Policy*, 24: 101-121, 2005.
- Lesmana, S.I., "Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia," Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Liestiani, A., "Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006," Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2008.
- Mya Dewi Trisnawati dan Komarudin Achmad, "Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet," *Simposium Nasional akuntansi XVII Mataram*, 2014.
- Medina, F., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia," Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Nainggolan, A.T., & Purwanti, D., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah via Website," *STAN*, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010.
- Pitri, D.P. & Merina, C.I., "Faktor-Faktor Penentu Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui E-Government Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Paper dipresentasikan pada Seminar Hasil Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Darma," 17 Maret 2017, Palembang, 2017.
- Prabowo, Adhi Wicaksono Daniel, "Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet (IFLGR) dan faktor-faktor yang mempengaruhi," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi*, Volume XVI, No.1 Januari, 2016.
- Rora, P.S., "Pengaruh Kinerja, Tingkat Ketergantungan dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela pada Situs Pemda," Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, 2010.
- Setyowati, Lilis, "Determinan yang Mempengaruhi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol 6 (1) April, Hal:45-62, 2016.
- Solihin, D., "Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel," Paper dipresentasikan pada Diklatpim Tingkat IV Angkatan III Pusklat Pegawai BPK, 30 November 2006, Jakarta, 2006.
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabet, 2014.

Syafitri, F, "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan," Skripsi. Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008.

Verawaty, V, "Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia," Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVIII, Universitas Sumatera Utara, 16-19 September 2015, Medan. 2015.

Verawaty, "Determinan Transparansi Informasi Keuangan Daerah melalui E-Government Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan," *Akuisisi Journal of accounting & Finance*, Vol 13 Number 2, page 92-107, 2017.